

IMPLEMENTASI TUJUAN KE-2 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN STUNTING DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Evangelystha Lumban Tobing¹

Aji Ratna Kusuma²

Daryono³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman

Alamat email Koresponden: evangelysthalt@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain and analyze the implementation, impact and inhibiting factors in overcoming stunting problems in East Kutai Regency. This research was conducted in Sangatta. The research method used descriptive qualitative research, namely data collection through observation, interviews, documentation, and literature research. Data analysis used interactive modeling data analysis techniques in the form of data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results showed that the implementation of the 2nd goal of the Sustainable Development Goals (SDGs) in overcoming the problem of stunting in East Kutai Regency has been implemented very well. The stunting prevalence rate in East Kutai Regency has decreased to 16.4%. Seminars, campaigns and the use of applications are used to maximize the achievement of policy implementation. The limited human resources are still an obstacle, while the budget resources have no significant obstacles. The disposition carried out by all parties involved has been running well and in accordance with standard operating procedures (SOPs) and is carried out with full responsibility in accordance with their respective tasks and functions. So, based on the research that has been done, communication is still the biggest inhibiting factor in the implementation of this policy. The implementation of the 2nd goal of the Sustainable Development Goals (SDGs) in overcoming the problem of stunting in East Kutai Regency has been well implemented but not optimal.

Keywords: *Policy Implementation, Sustainable Development Goals, Stunting*

PENDAHULUAN

Salah satu hambatan terbesar bagi pembangunan manusia adalah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Stunting bertanggung jawab atas 15-17% kematian anak di seluruh dunia. Anak-anak stunting kurang mampu memberikan kontribusi kepada komunitas dan pembangunan ekonomi dan sosial negara. Karena itu, pemahaman yang kuat tentang stunting dan cara mencegahnya dianggap penting dan perlu dilakukan oleh masyarakat (Ismail, 2022, p. 2).

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Pencegahan dan penanggulangan stunting memerlukan kerja sama yang kuat dari berbagai lembaga dan kementerian karena penyebab stunting sangat kompleks (Siswati, 2018, p. 3). Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dengan menjamin bahwa anak-anak dapat tumbuh tanpa kemiskinan, dengan kondisi sehat dan berpendidikan, serta merasa bahagia dan aman, adalah landasan untuk menciptakan individu dewasa yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tingkat kohesivitas sosial yang tinggi.

Tujuan nomor 2 dari 17 tujuan SDGs adalah zero hunger (tanpa kelaparan). Salah satu indikator dalam SDGs nomor 2 adalah mengukur prevalensi stunting sebagai salah satu tanda kualitas gizi anak. Kabupaten Kutai Timur memiliki tingkat anak stunting tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, dengan persentase sebesar 27,5 %. Akibatnya, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan masalah stunting melalui program percepatan penurunan stunting dan menjadikan masalah stunting sebagai tujuan pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan

menjadikan capaian stunting ke dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kutai Timur. Keberhasilan negara dalam mencapai agenda global didorong oleh komitmen pemerintah daerah.

Administrasi publik menganggap implementasi kebijakan publik sebagai proses kegiatan yang berkaitan dengan penerapan organisasi dan manajemen di unit administratif untuk mencapai pelaksanaan kebijakan publik (politik). Dalam studi Ilmu Administrasi Publik esensi ini merupakan wujud komitmen negara dalam mengimplementasi dan mencapai tujuan dalam agenda internasional, dalam hal ini yaitu Sustainable Development Goals (SDGs).

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2013 Pasal 15 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Kabupaten Kutai Timur telah memasukkan tujuan SDG ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur untuk menerapkannya. Itu sebabnya penting untuk membahas masalah ini lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana SDGs diterapkan untuk mengatasi masalah stunting yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini diantaranya adalah pada implementasi Tujuan ke-2 *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Kutai Timur dengan indikator diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selanjutnya focus pada dampak implementasi Tujuan ke-2 *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Intevensi Gizi Spesifik & Intevensi Gizi Sensitif) serta faktor penghambat dalam Implementasi Tujuan ke-2 *Sustainable Development*

Goals (SDGs) dalam mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Kutai Timur.

Penelitian ini dilakukan di Kota Sangatta, yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Kutai Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ilmiah terdiri data primer dan sekunder. Data Primer dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui wawancara atau observasi, yang dipandu oleh daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti untuk dijawab oleh informan kunci dalam penelitian tersebut. Informan kunci tersebut adalah: Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DPPKB) Kab. Kutai Timur (Leading Sector), Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur, Dinas Sosial Kab. Kutai Timur. Adapun data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari sumber tertulis atau sudah ada sebelumnya, seperti laporan, dokumen, dan arsip lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi Literatur dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan Data (*Data Collection*), Kondensasi data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), Pengambilan dan verifikasi kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*).

Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan Edward III

Edward III dalam Fitria et al., (2020) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan yaitu:

1. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi oleh komunikator kepada komunikan melalui suatu media yang menimbulkan efek. Komunikasi kebijakan berarti sebuah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kegiatan (policy

- implementators). Sebuah komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari beberapa hal penting yaitu transformasi informasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi.
2. Sumber daya yang dimaksud berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan penerapan kebijakan. Sumber daya ini meliputi manusia dan anggaran.
 3. Disposisi, kecenderungan perilaku dan karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.
 4. Struktur birokrasi, perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Hal yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan, variabel itu adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat binstansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

PEMBAHASAN

Komunikasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat dapat terwujud hanya jika implementator memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang harus mereka lakukan. Untuk mengurangi distorsi dalam

implementasi, tujuan dan target kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran.

Transmisi Komunikasi

Guna membahas program percepatan, pencegahan dan penurunan angka stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggelar rembuk stunting tahun 2023 yang dihadiri oleh berbagai perangkat daerah (PD) terkait, TP PKK, Forkopimda, Rorum CSR, DWP, IBI, IDI, serta Camat Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. PT KPC dan PT PAMA Persada Nusantara Sangatta juga turut serta, serta Dinkes Provinsi Kaltim, Camat, Kades/Lurah, KPM, TPP Kecamatan, TPS Desa, dan TPK se- Kutai Timur. Yang terlibat dalam proses sosialisasi adalah Tim Pendamping Keluarga (TPK), TPK ini merupakan sekelompok orang yang terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB Desa yang melaksanakan pendampingan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi bantuan sosial serta surveilans pengawasan pengamatan untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting.

Penyampaian tentang implementasi percepatan penurunan stunting kepada pejabat yang berwenang ataupun masyarakat dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kutai Timur, Rapat Koordinasi Tim Teknis Audit Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kutai Timur, Rembuk stunting Tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan regulasi daerah dan launching inovasi pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kutai Timur sosialisasi pada posyandu dan melaksanakan sosialisasi dengan mendatangi rumah-rumah. Dinas Sosial sebagai pendukung berkoordinasi dengan DPPKB sebagai leading sector, juga berkoordinasi dengan OPD

terkait seperti Dinas Kesehatan dalam mensosialisasikan kebijakan ini agar sampai ke masyarakat di setiap kecamatan di Kab. Kutai Timur.

Pada Dinas Kesehatan, komunikasi yang dilakukan berupa koordinasi, sosialisasi, pemanfaatan media spanduk dan website sebagai cara penyampaian kebijakan. Sosialisasi ini dilakukan ke Kelurahan maupun ke masyarakat langsung, spanduk juga dipasang di setiap Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, hingga Polindes. DPPKB juga mengajak pihak-pihak yang dapat melancarkan kegiatan sosialisasi ini kepada masyarakat seperti Kader Desa sehingga sosialisasi yang diberikan tentang stunting kepada masyarakat dapat diikuti dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Kejelasan Komunikasi

Kejelasan komunikasi sangat berperan dalam implementasi agar transmisi komunikasi yang telah terjadi dapat dipahami baik oleh pelaksana, sasaran dari kebijakan tersebut maupun pihak lain yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Pihak DPPKB melakukan koordinasi dan menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan di setiap wilayah terkait penanganan penurunan stunting ini, dan informasi ini telah disampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh para pelaksana dan masyarakat. Dinas Sosial juga selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan penurunan stunting di Kab. Kutai Timur ini. Setiap 3 bulan selalu diadakan rapat koordinasi untuk mendengar masukan, saran, dan proses yang telah berjalan dari program ini. Masukan-masukan tersebut kemudian disampaikan pada rapat yang diadakan minimal setahun sekali yaitu Rembuk Stunting yang di hadiri oleh semua OPD terkait.

Kemudian terkait dengan proses komunikasi yang dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan ini sudah 90% sudah jelas dan dimengerti oleh

masyarakat, sisanya merupakan persentase kendala yang dihadapi akibat kondisi geografis. Karena seringkali, masyarakat yang berada di pelosok susah di jangkau, misalnya saja daerah Sandaran, tidak ada jalur darat disana, sehingga para pelaksana implementasi kebijakan ini kesulitan untuk menjangkau daerah tersebut, karena terhalang masalah sinyal dan akses jalan. Kemudian, Informasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan juga jelas dan dimengerti oleh masyarakat, hal ini didukung dengan pencapaian target penurunan persentasi stunting yang ada Kab. Kutai Timur pada 2023 lalu.

Konsistensi Komunikasi

Konsistensi Komunikasi dilakukan dengan harapan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kebingungan di pelaksana serta target dari kebijakan tersebut. Sejauh ini, meskipun terkendala dengan kondisi geografis dan sinyal, secara teknis belum pernah terjadi miskomunikasi dalam proses komunikasi, artinya penyampaian kebijakan yang dilakukan cukup konsisten sampai ke masyarakat. Sejauh ini miskomunikasi yang ada dapat diselesaikan dengan verifikasi ulang ke masing-masing pihak terkait, artinya penyampaian kebijakan yang dilakukan juga konsisten sampai ke masyarakat.

Aplikasi Stop Stunting merupakan Aplikasi yang dibangun Bersama antara DPPKB Kutai Timur dan SKILL ICT Solution yakni sebuah Perusahaan pemasaran produk dan solusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Aplikasi ini sebagai salah satu upaya dan inovasi pemerintah daerah untuk penanganan stunting. Aplikasi Stop Stunting bertujuan untuk menciptakan keseragaman data. Sehingga kemampuan identifikasi kasus stunting secara benar dilapangan berdasarkan nama dan alamat lengkap akan terjaga dengan rapi dan baik. Selain Aplikasi Stop Stunting, DPPKB juga memaksimalkan implementasi

kebijakan ini dengan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah & Hamil). Aplikasi ini merupakan inovasi dari BKKBN untuk menekan angka stunting yang ditujukan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita. Manfaat Elsimil ini sendiri diantaranya: Alat *screening* untuk mendeteksi faktor risiko pada calon pengantin, menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping. Dan sebagai media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil terutama yang terkait dengan faktor risiko stunting. Secara umum, informasi yang disampaikan sudah dilaksanakan dengan baik.

Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu pemerintahan adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Terkait sumber daya financial (anggaran) dirasa sudah mencukupi, dan terkait sumber daya manusia masih kurang, hal ini dikarenakan ada beberapa kecamatan di Kab. Kutai Timur, salah satunya seperti Telen yang masih kekurangan petugas, mengingat kondisi geografis yang masih susah sinyal dan lokasi yang susah sekali untuk di jangkau, seringkali petugas-petugas yang ditempatkan di masing-masing kecamatan yang jauh mengundurkan diri, sehingga masih kekurangan SDM untuk di daerah pelosok. Untuk Dinas Sosial sendiri belum ada anggaran khusus untuk penanganan stunting ini, selain untuk anggaran Rehabilitasi Sosial (Rehabsos). Anggaran yang di berikan sudah cukup, namun pada tahun 2020-2021, dirasa belum optimal karna hanya terpakai 30% dari total keseluruhan anggaran yang ada, sementara pada tahun 2023, lebih 90% telah digunakan secara optimal untuk implementasi kebijakan ini.

Terkait SDM (Sumber Daya Manusia), Dinas Kesehatan masih kekurangan Tenaga Kesehatan (Nakes) untuk daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Kutai Timur, hal ini membuat implementasi kurang

optimal, karena ketika ada masyarakat yang memerlukan penanganan, masyarakat masih kesusahan akibat terhalang masalah kondisi geografis dan sinyal.

Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen, konsistensi dan kejujuran dari para implementor/pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar, serta tingkat demokrasi dalam pelaksanaannya. Secara umum disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam penanganan stunting di Kab. Kutai Timur ini sudah sangat baik, hal ini terlihat dari kesungguhan dan semangat kerja dari setiap pelaksana. Konsistensi dari para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan keamanan dan ketertiban di setiap desa sudah sangat baik dilihat dari ketaatan dan disiplin mereka melaksanakan pelayanan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Ketika ada kebijakan ini yang kemudian harus diimplementasikan, setiap OPD terkait langsung bergerak cepat, dan melaksanakannya dengan senang hati sesuai dengan arahan dan program kerja yang telah di berikan. Kerja ada aturannya. Disposisi ini memiliki kegunaan dan fungsi untuk mengetahui petunjuk atau tindakan yang harus dilakukan oleh bawahan. Disposisi bersifat segera. Maka itu, harus langsung segera dilakukan dan dikerjakan sesuai petunjuk.

Struktur Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan kebijakan percepatan penurunan stunting tidak menetapkan organisasi pelaksana secara khusus. Pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di tiap desa dilaksanakan oleh unit organisasi (seksi/urusan) yang telah ada

didalam organisasi pemeritahan desa sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan sesuai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Walaupun tidak ada struktur organisasi pelaksana namun implementasi kebijakan stunting di Kabupaten Kutai Timur ini dapat berjalan sangat baik dan efektif. Setiap OPD terkait sudah bekerja sesuai SOP yang ada, manfaat SOP kan sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tugas pelaksana kebijakan, mengurangi tingkat kesalahan juga dan kelalaian yang mungkin dilakukan sebagai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas. Setiap pekerjaan memiliki aturannya masing-masing. Tanpa SOP yang baik, akan sangat sulit berharap kinerja instansi pemerintah berjalan efektif dan efisien.

Dampak Implementasi Tujuan Ke-2 *Sustainable Development Goals* dalam Mengatasi Permasalahan *Stunting* di Kabupaten Kutai Timur

Tujuan implementasi kebijakan ini dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah dan tentunya Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Kutai Timur ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Stunting pada balita berdampak pada timbulnya potensi kerugian ekonomi karena penurunan produktivitas kerja dan biaya perawatan. Dengan adanya implementasi ini di harapkan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan daya saing bangsa. Dinas Sosial sangat mengharapkan dampak positif dalam implementasi kebijakan ini. Masalah stunting ini sangat penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak.

Hal ini harus segera ditindaklanjuti agar prevalensi stunting di Kab. Kutai Timur dapat menurun. Latar belakang di buatnya program Penurunan Stunting ini adalah tingginya angka penderita Stunting di

Kabupaten Kutai Timur dan penanggulangan Stunting ini merupakan program prioritas nasional. Tentunya implementasi ini diharapkan dapat terlaksana dengan optimal sehingga intervensi spesifik dan sensitif dapat ditangani dengan merata. Implementasi kebijakan ini membawa pengaruh positif dalam penurunan stunting di Kab. Kutai Timur.

Intervensi Gizi Spesifik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur

Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil:

1. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
2. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
3. Mengatasi kekurangan iodium;
4. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil;
5. Melindungi ibu hamil dari malaria

Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan:

1. Mendorong Inisiasi menyusu dini;
2. Mendorong pemberian ASI eksklusif

Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan

1. Mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI);
2. Menyediakan obat cacing;
3. Menyediakan suplementasi zink (zat besi);
4. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
5. Memberikan perlindungan terhadap malaria;
6. Memberikan imunisasi lengkap;
7. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Intervensi Gizi oleh Dinas Kesehatan, DPPKB dan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur

Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum:

1. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
2. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
3. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
4. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal;
5. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
6. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
7. Melakukan fortifikasi bahan pangan;
8. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana;
9. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
10. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
11. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi;
12. Memberikan pendidikan anak usia dini universal.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Tujuan Ke-2 Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Mengatasi Permasalahan Stunting di Kabupaten Kutai Timur

Dalam sebuah penerapan kebijakan, tidak akan lepas dari faktor penghambat penerapan kebijakan. Kalau untuk masalah komunikasi, yang menjadi faktor penghambat disini adalah sinyal di beberapa kecamatan serta akses atau transportasi yang jauh antar desa ke desa. Dari segi sumber daya, yang menjadi faktor penghambat adalah banyak sumber daya manusia yang mengundurkan diri akibat susah akses internet dan

lokasi yang jauh, akses internet yang susah ini membuat kinerja mereka terhambat dalam penanganan implementasi.

Dari segi sumber daya anggaran yang menjadi penghambat adalah lambatnya proses administrasi terkait anggaran, bisa memakan waktu hingga 2-3 bulan. Selain itu Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur juga masih memiliki keterbatasan nakes, jadi tidak semua desa punya nakes. Apalagi di daerah-daerah pelosok yang rata-rata masyarakatnya berdomisili di daerah sawit, akses untuk menuju kesana susah sekali dan akses internet juga masih terbatas di daerah sana

SIMPULAN

Komunikasi dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kab.Kutai Timur ini telah dilakukan dengan baik dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Seminar dan kampanye stunting, serta penggunaan aplikasi juga digunakan dalam mensosialisasikan dan memaksimalkan pengimplementasian kebijakan ini kepada masyarakat. Sumber Daya dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kab.Kutai Timur ini masih memiliki kendala terutama pada Sumber Daya Manusia, sedangkan pada Sumber Daya Keuangan tidak terdapat kendala ataupun permasalahan yang dapat menghambat penerapan kebijakan ini.

Disposisi yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat telah berjalan dengan baik dan adanya dukungan dari tingkat Pemerintah hingga ke masyarakat dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kab.Kutai Timur. Struktur Organisasi semua peran dilaksanakan sesuai dengan SOP.

Tujuan implementasi kebijakan ini dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah dan tentunya Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Kutai Timur ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya implementasi ini di

harapkan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan daya saing bangsa. Masalah stunting ini sangat penting untuk diselesaikan, karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak. Hal ini harus segera ditindaklanjuti agar prevalensi stunting di Kab. Kutai Timur dapat menurun. Latar belakang di buatnya program Penurunan Stunting ini adalah tingginya angka penderita Stunting di Kabupaten Kutai Timur dan penanggulangan Stunting ini merupakan program prioritas nasional. Tentunya implementasi ini diharapkan dapat terlaksana dengan optimal sehingga intervensi spesifik dan sensitif dapat ditangani dengan merata. Implementasi kebijakan ini nyatanya membawa pengaruh positif dalam penurunan stunting di Kab. Kutai Timur

Implementasi kebijakan ini membawa dampak positif dalam penurunan stunting di Kab. Kutai Timur. Berdasarkan data e-PPBGM Semester 1 dan 2 tahun 2024 yang diperoleh dari satgas yang bertugas, angka prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan. Angka prevalensi risiko stunting di Kutim turun menjadi 16,4% pada Februari 2024, menurun dari angka 17,04% pada tahun 2023.

Sedangkan pada faktor penghambat, komunikasi, yang menjadi faktor penghambat disini adalah kondisi geografis yang mengakibatkan susah sinyal di beberapa kecamatan serta akses atau transportasi yang jauh antar desa ke desa, bahkan beberapa desa hanya bisa menggunakan kapal karena tidak bisa ditempuh melalui jalur darat. Sumber daya, yang menjadi faktor penghambat adalah banyak sumber daya manusia yang mengundurkan diri akibat susah akses internet dan lokasi yang jauh, akses internet yang susah ini membuat kinerja mereka terhambat dalam penanganan implementasi.

Sumber daya anggaran, yang menjadi penghambat adalah lambatnya proses administrasi terkait anggaran, bisa memakan waktu hingga 2-3

bulan. Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur juga masih memiliki keterbatasan nakes, jadi tidak semua desa punya nakes. Apalagi di daerah-daerah pelosok yang rata-rata masyarakatnya berdomisili di daerah perkebunan sawit. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, komunikasi masih menjadi faktor penghambat paling besar dalam implementasi kebijakan ini. Implementasi tujuan ke-2 *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mengatasi permasalahan stunting di Kab. Kutai Timur sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani., dkk. (2022). Stunting Pada Anak. PT Global Eksekutif Teknologi.
<https://www.researchgate.net/publication/364952626>
- Akbar, I., & Huriah, T. (2022). Modul Pencegahan Stunting. LeutikaPrio.
- Arida, I. N. S. (2020). Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan.
www.sobatpetualang.com
- Ariestiningsih, E. S., dkk. (2022). Implementasi Program “Senar Kuat” Sebagai Model Upaya Cegah Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(8), 2639–2657. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i8.7188>
- Azizah, T. N., & Agustina, I. F. (2023). Peran Desa Dalam Menekan Stunting Sebagai Upaya Pencapaian SGDs Desa Sukondo. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 1–12.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (n.d.). Kebijakan Dan Strategi Pelayanan Keluarga Berencana.
- Bappenas. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) (Vol. 17).
- Bhatari, A. S., dkk. (2022). Cegah Stunting Demi Generasi Cemerlang.

- Dewi, D. S. K. (2022). Kebijakan Publik (Proses, Implementasi dan Evaluasi). Samudra Biru.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). Kajian Program Keluarga Harapan.
- Febriyeni, C., dkk. (2023). Stunting. Pustaka Aksara.
- Gunawan, H. (2022). Fungsi Pendidikan Dan Pengasuhan Dalam Keluarga. *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* , 1(2), 101–108.
- Hadjarati, H., dkk. (2022). Penyuluhan Pencegahan Stunting Pada Anak Dalam Mencapai Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Jaya Bakti dan Desa Lambangan Kecamatan Pagimana. *JPKM: Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.37905/.v2i2.12257>
- Ismail, K. (2022). Aplikasi Penyuluhan Pencegahan Stunting. Tahta Media Group.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Revisi Buku Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Rematri dan WUS.
- Markipuddin, L., dkk. (2021). Kebijakan Dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting Di Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) .
- Martini, N. K., & Astuti, N. P. W. (2017). Faktor-Faktor Pendorong Ibu Dalam Memberikan Asi Eksklusif di UPT Puskesmas II Denpasar Barat. *Jurnal Kesehatan Terpadu* 1 , 1(1), 12–18.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). LeutikaPrio.
- Pasolong, H. (2020a). Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 1 (2017).

- Rahmasari, S. A., & Wicaksono, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Jember Dalam Upaya Percepatan Pencapaian Target Sustainable Development Goals.
- Ravyansah, Purba, S., dkk. (2022). Kebijakan Publik. PT Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Risnawati, I., & Munafiah, D. (2022). Upaya Pencegahan Stunting Melalui Pemberian Makanan Seimbang dan Stunting Massage. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(1), 40–46.
- Rudiyanto, A. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II.
- Safina, S. W., dkk. (2023). Kasus Stunting sebagai Salah Satu Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Salatiga. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1), 76–83. <https://doi.org/10.22146/mgi.70636>
- Samsudin, M., dkk. (2017). Buku Surveilans untuk Mengatasi Masalah Gangguan Akibat Kekurangan Iodium. Lembaga Penerbit Badan Litbangkes.
- Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>
- SDG Baseline report Indonesian. (n.d.).
- Shi, L., dkk. (2019). The Evolution of Sustainable Development Theory: Types, Goals, and Research Prospects. *Sustainability (Switzerland)*, 11(24). <https://doi.org/10.3390/su11247158>
- Sholahuddin, A., & Hidayaturrahman, M. (2021). Metodologi penelitian sosial perspektif kualitatif kuantitatif. <https://www.researchgate.net/publication/353572200>

- Simanulang, R. (2019). Kapabilitas Program Asah, Asih dan Asuh Dalam Penanggulangan Stunting Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. Universitas Lampung .
- Siswati, T. (2018). Stunting (H. Kusnanto & T. Sudargo, Eds.). Husada Mandiri.
- Situmeang, N., & Putri, S. Y. (2021). Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting di Indonesia. *Jurnal PIR*, 5(2), 163–174.
- Suandi, Nirmala, I., dkk.. (2022). Kebijakan Publik. Widina Bhakti Persada Bandung . www.penerbitwidina.com
- Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Susilawati, & Pratama, N. H. (2023). Literature Review: Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Wilayah Pesisir Medan Belawan. 3(2), 52–57.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. APIPI Bandung.
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama .
- Widiastuti, R. N. (2019). Bersama Perangi Stunting. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.